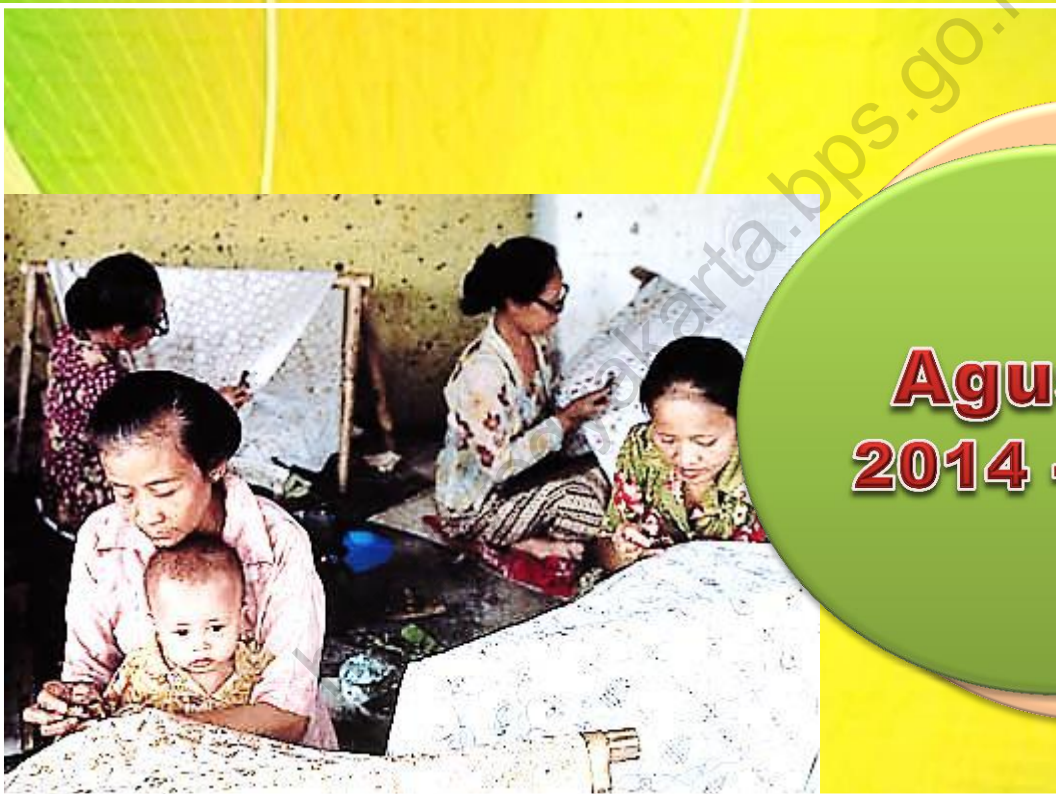


KATALOG BPS : 2302002.34

Indikator Tingkat Hidup Pekerja/karyawan D.I. Yogyakarta



**Agustus
2014 - 2015**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

Indikator Tingkat Hidup Pekerja/karyawan D.I. Yogyakarta



**Agustus
2014 - 2015**

Indikator Tingkat Hidup Pekerja/karyawan D.I. Yogyakarta, Agustus 2014 - 2015

ISBN : 2460-3171
Nomor Publikasi : 34.520.1605
Katalog BPS : 2302002.34
Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman :viii+28 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dicetak oleh :
CV Magna Raharja Tama (Mahata) Yogyakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja/karyawan D.I.Yogyakarta Agustus 2014-2015 merupakan publikasi tahunan BPS Provinsi D.I. Yogyakarta ke sebelas yang bertujuan memberikan gambaran tentang tingkat hidup pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta keadaan tahun 2014-2015. Informasi statistik dalam publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan dan menjadi landasan untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah rangkuman dari pengolahan beberapa data dasar hasil survei BPS Provinsi D.I. Yogyakarta maupun data sekunder dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I. Yogyakarta. Indikator yang diukur meliputi keadaan pekerja/karyawan, sektor/lapangan usaha dan pendidikan pekerja/karyawan, rata-rata upah/gaji dari pekerja/karyawan, Upah Minimum (UMP), dan pasar tenaga kerja.

Publikasi ini diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi penyusunan kebijakan pengambilan keputusan. Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak, atas perhatian dan bantuan yang diberikan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Saran untuk memperbaiki publikasi indikator tingkat hidup pekerja/karyawan sangat diharapkan.

Yogyakarta, Mei 2016
Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,



Y. Bambang Kristianto, MA

ABSTRAKSI

Publikasi Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan D.I. Yogyakarta Agustus 2014 - 2015 merupakan salah satu publikasi yang dihasilkan oleh BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. Indikator tingkat hidup pekerja/karyawan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat hidup pekerja/karyawan. Indikator yang disajikan meliputi keadaan pekerja/karyawan, sektor/lapangan usaha dan pendidikan pekerja/karyawan, rata-rata upah/gaji dari pekerja/karyawan, upah minimum kab/kota (UMK), upah minimum provinsi (UMP), dan pasar kerja.

Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa sekitar 54,9 persen penduduk yang bekerja di D.I. Yogyakarta berstatus sebagai pekerja/karyawan, baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja bebas. Penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai pekerja/karyawan sebesar 62,5 persen dan perempuan sebesar 44,7 persen. Persentase pekerja/karyawan/buruh laki-laki meningkat 5,2 poin dan perempuan meningkat 1,9 poin dibanding Agustus 2014.

Sektor S (*services*) sampai Agustus 2015 merupakan sektor yang paling dominan menyerap pekerja/karyawan yaitu sebesar 66,4 persen, menurun dibandingkan kondisi Agustus 2014 sebesar 72,0 persen. Dilihat menurut wilayah, pekerja/karyawan yang bekerja di sektor S pada Agustus 2015 adalah sebesar 67,1 persen di daerah perkotaan dan 44,8 persen di daerah pedesaan. Sebaliknya sektor A (*Agriculture*) hanya menyerap tenaga kerja sebesar 4,5 persen di daerah perkotaan dan 10,4 persen daerah pedesaan.

Pada tahun 2015 tingkat pendidikan pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta mengalami perubahan. Persentase tertinggi pendidikan pekerja adalah SLTA sebesar 42,4 persen atau meningkat 2,4 poin dibandingkan kondisi tahun 2014 yang sebesar 40,0 persen. Persentase yang berpendidikan SLTP ke bawah dan di atas SLTA menurun masing-masing dari 36,8 persen menjadi 34,9 persen dan 23,2 persen menjadi 22,7 persen.

Dilihat secara gender masih ada perbedaan yang signifikan dalam upah/gaji, pekerja/karyawan perempuan lebih rendah dibandingkan pekerja/karyawan laki-laki. Rata-rata upah pekerja/karyawan perempuan pada Agustus 2015 sebesar Rp. 1.525.481,- sedangkan untuk laki-laki mencapai Rp. 1.774.600,- sebulan. Berdasarkan sektor/lapangan usaha, upah pekerja/karyawan terendah terjadi di sektor A yaitu sebesar Rp. 785.877,-.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAKSI.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. SUMBER DATA	7
III. KONSEP DAN DEFINISI	8
IV. PEKERJA/KARYAWAN DAN PENDUDUK YANG BEKERJA	11
V. PEKERJA/KARYAWAN MENURUT SEKTOR/LAPANGAN USAHA	15
VI. PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN.....	18
VII. RATA-RATA UPAH/GAJI PEKERJA/KARYAWAN.....	20
VIII. UPAH MINIMUM KAB/KOTA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI	23
IX. PASAR TENAGA KERJA	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di D.I. Yogyakarta Agustus 2014 - Agustus 2015	12
Tabel 2. Persentase Pekerja Perempuan dengan Status Pekerja Keluarga/Tak Dibayar menurut Sektor di D.I. Yogyakarta Agustus 2014 - Agustus 2015.....	13
Tabel 3. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor/lapangan usaha di D.I. Yogyakarta, Agustus 2014 - Agustus 2015	16
Tabel 4. Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2014 - Agustus 2015.....	18
Tabel 5. Rata-rata Upah/Gaji Sebulan menurut Sektor/Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta, Agustus 2014 - Agustus 2015	20
Tabel 6. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta, 2012-2016.....	24
Tabel 7. Pasar Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2014-2015	25
Tabel 8. Tenaga Kerja Indonesia menurut Kabupaten/Kota dan Negara Tujuan Terbanyak di D.I. Yogyakarta 2015	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor dan Daerah Tempat Tinggal di D.I. Yogyakarta, Agustus 2014 - Agustus 2015.....	17
Gambar 2. Rata-rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2015	21
Gambar 3. Persentase Pencari Pekerjaan yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I. Yogyakarta Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015	26

<http://yogyakarta.bps.go.id>

I. PENDAHULUAN

Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Besar karena menyangkut jutaan jiwa. Untuk menggambarkan masalah tenaga kerja di masa yang akan datang tidaklah gampang karena selain mendasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, harus juga diketahui prospek produksi di masa mendatang. Kondisi kerja yang baik, kualitas output yang tinggi, upah yang layak serta kualitas sumber daya manusia adalah persoalan yang selalu muncul dalam pembahasan tentang tenaga kerja di samping masalah hubungan industrial antara pekerja dengan dunia usaha.

Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang penting adalah modal asing, proteksi iklim investasi, pasar global, dan perilaku birokrasi serta "tekanan" kenaikan upah (Majalah Nakertrans, 2004). Otonomi daerah yang dalam banyak hal juga tidak berpengaruh positif terhadap tenaga kerja. Masalah kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi dan stabilitas politik juga sangat berpengaruh terhadap ketenagakerjaan. Rucker (1985:2) sebagaimana dilansir oleh majalah Nakertrans, menduga bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia bersifat multidimensi sehingga juga memerlukan cara pemecahan yang multidimensi pula. Tidak ada jalan pintas dan sederhana untuk mengatasinya. Strategi pemulihan dan rekonstruksi ekonomi yang bertumpu pada penciptaan lapangan kerja merupakan keharusan. Dalam kaitan ini, masih sangat relevan untuk diperhatikan secara serius dua elemen strategi yang pernah diajukan oleh Misi ILO (1999:5) yaitu (i) strategi dan kebijakan yang membuat proses pertumbuhan ekonomi menjadi lebih memperhatikan aspek ketenagakerjaan, dan (ii) tindakan yang dibutuhkan untuk mendapatkan lapangan kerja tambahan melalui program-program penciptaan lapangan kerja secara langsung.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila

terjadi pertumbuhan *output* riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan *output* perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

Pertambahan penduduk berarti pertambahan tenaga kerja serta berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang berkurang mengakibatkan kenaikan output semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup. Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang berkurang. Penyebab rendahnya pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa pertambahan kuantitas dan kualitas sumber daya alam, kapital, dan kemajuan teknologi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Meskipun demikian, kita masih mempertanyakan apakah begitu cepatnya pertumbuhan penawaran angkatan kerja di negara-negara berkembang benar-benar akan memberikan dampak positif, atau justru negatif, terhadap pembangunan ekonomi. Sebenarnya, positif atau negatifnya pertambahan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Adapun kemampuan itu sendiri lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara, tetapi tenaga kerja juga dapat menjadi faktor penghambat apabila

tenaga kerja yang ada mendatangkan berbagai macam masalah. Ketenagakerjaan di Indonesia masih kurang optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi meskipun program penurunan angka pengangguran terus dicanangkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, tingkat pengangguran di Indonesia per Agustus 2014 menurun menjadi 5,94 persen, dibanding Agustus 2013 yang sebesar 6,17 persen artinya telah terjadi penurunan angka pengangguran sekitar 166 000 orang sepanjang periode tersebut sehingga jumlah pengangguran di Indonesia menjadi sebanyak 7,25 juta orang. Tantangan besar bangsa Indonesia adalah menciptakan lapangan kerja atau usaha yang layak (*decent work*) bagi tenaga kerja yang jumlahnya banyak dan cenderung terus meningkat. Tantangan itu mencakup dua aspek sekaligus yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan peningkatan produktifitas kerja bagi mereka yang sudah bekerja sehingga memperoleh imbalan kerja yang memadai untuk dapat hidup secara layak (*decent living*).

Tantangan itu jelas terlalu berat untuk dihadapi hanya oleh pemerintah. Meskipun demikian, peran yang dimainkan pemerintah dapat sangat menentukan jika dilakukan melalui pembangunan yang secara benar dan konsisten yang dirancang berbasis ketenagakerjaan, serta dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor-sektor pekerjaan informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian masalah industrial yang dapat memenuhi semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan.

Kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah juga menjadi kendala, hal ini di latarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja, seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, tingkat kehadiran, inisiatif dan kreativitas, kesehatan serta perilaku/sikap. Sedangkan untuk faktor eksternal, meliputi: kedisiplinan kerja, tingkat kerja sama, perasaan aman dan nyaman dalam bekerja, teknologi yang digunakan untuk

mendukung pelaksanaan pekerjaan dan bidang pekerjaan sesuai dengan bidang yang diminati. Motivasi bekerja yang kurang atau yang menunjukkan sifat kemalasan tenaga kerja akan membuat pekerjaannya tidak membuahkan hasil yang baik dan maksimal. Keterampilan tenaga kerja pun sangat mempengaruhi kualitas kerjanya. Sehingga kualitas tenaga kerja Indonesia dan hasil produksinya kurang maksimal. Pekerja dengan produktivitas yang tinggi, agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi harus dilakukan dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Untuk itu pekerja harus dibekali dengan pengakuan kompetensi profesi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

Visi Indonesia yang maju dan mandiri tercermin dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada pencapaian sasaran secara umum, berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang diperlihatkan oleh angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1 atau ekuivalen dengan angka fertilitas total (TFR) 2,1 per satu orang perempuan usia reproduktif. Intinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan adalah berupa peningkatan daya saingnya. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan menyelenggarakan pembangunan pendidikan sehingga memiliki daya saing dalam era global. Itu dilakukan dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara luas dan tanpa diskriminasi.

Modal sumber daya manusia merupakan sumber penggerak pertumbuhan dan daya saing yang sangat diperlukan dalam pasar global, karenanya harus ada jaminan bahwa anak-anak atau generasi penerus akan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah agar mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar yang memadai ketika mereka masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, akses terhadap pendidikan

harus ditingkatkan, meningkatkan kebijakan sosial seperti beasiswa, subsidi sekolah, dan bantuan tunai bersyarat untuk memastikan anak-anak lulus SD dan SMP. Juga perlu diselenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

Karena itu, perlu disediakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang memadai. Penyediaan pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia di masa depan, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi dan pemberian perhatian yang lebih besar pada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan pendidikan.

Penciptaan lapangan kerja dengan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, di antaranya mencakup kualitas pendidikan, kesinambungan sosial, dan lingkungan usaha yang kondusif dan berkeadilan. Penciptaan lapangan kerja di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti nilai tukar mata uang, suku bunga perbankan, posisi kebijakan fiskal, inflasi, dan perdagangan. Indonesia memiliki berbagai anugerah berlimpah sebagai sumber potensial penyumbang pertumbuhan ekonomi, yakni lahan yang sangat luas, sumber daya alam, meningkatnya masyarakat kelas menengah, dan konsumsi dalam negeri yang kuat, kedekatan geografis dengan tujuan-tujuan utama ekspor, serta jumlah tenaga kerja yang besar.

Perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam rangka perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan secara menyeluruh, kebijakan di bidang perlindungan tenaga kerja diarahkan kepada perbaikan upah, persyaratan kerja, kondisi kerja dan jaminan sosial lainnya.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang perbaikan kesejahteraan pekerja/karyawan dilakukan dengan usaha pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan dengan keadaan tingkat hidup pekerja/karyawan dalam bentuk publikasi yang disebut Indikator Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan. Indikator ini disusun sedemikian rupa sehingga merupakan cerminan dari Statistik Tingkat Hidup Pekerja/Karyawan.

Publikasi ini menyajikan indikator yang masih sederhana, baik dalam bentuk maupun cakupannya. Indikator yang disajikan meliputi :

- Pekerja/karyawan dan penduduk yang bekerja.
- Pekerja/karyawan menurut sektor/lapangan usaha.
- Pekerja/karyawan menurut pendidikan.
- Rata-rata upah/gaji bersih pekerja/karyawan.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Provinsi.
- Pasar Tenaga Kerja.

<http://yogyakarta.bps.go.id>

II. SUMBER DATA

Sumber data dalam publikasi ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Dilihat dari perkembangannya, Sakernas telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali dilaksanakan tahun 1976, baik cakupan sampel, wilayah dan rumah tangga maupun periode pencacahan. Sakernas pada tahun 1986 sampai dengan 1993 dilaksanakan secara triwulanan, yaitu Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (November), tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan, Sakernas dilaksanakan sekali dalam setahun. Mulai tahun 2005 sampai dengan 2010 Sakernas dilakukan secara semesteran, Semester I (Februari) dan Semester II (Agustus).

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November untuk mendapatkan angka estimasi provinsi dan pada bulan Agustus dilakukan penambahan sampel untuk angka estimasi kabupaten/kota. Unit pencacahannya adalah rumah tangga dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak dilaksanakan dan mulai tahun 2015 Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun).

Di samping sumber data tersebut, digunakan juga data dari publikasi BPS lainnya, seperti D.I. Yogyakarta Dalam Angka dan data sekunder yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

III. KONSEP DAN DEFINISI

1. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia atau wilayah observasi selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
2. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
3. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
4. **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
5. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
6. **Lapangan usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.
7. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu:
 - a. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar** adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. **Buruh/Karyawan/Pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian.
- f. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/bangunan,

sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).

- g. **Pekerja keluarga/tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:
- ✓ Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar.
 - ✓ Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak dibayar.
8. **Jenis pekerjaan/jabatan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini, didasarkan atas Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2002 yang mengacu kepada ISCO 88.
9. **Upah/gaji bersih** adalah upah/gaji bersih yang biasanya diterima selama sebulan oleh buruh/karyawan/pegawai baik berupa uang atau barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan. Upah/gaji bersih yang dimaksud adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan, iuran wajib, pajak penghasilan dan lain sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.
10. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah formal dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

IV. PEKERJA/KARYAWAN DAN PENDUDUK YANG BEKERJA

Dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS, penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang dikategorikan menjadi dua kelompok kegiatan yaitu penduduk yang aktif secara ekonomi dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi. Penduduk yang aktif secara ekonomi disebut dengan Angkatan Kerja dan Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi disebut Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan dan pengangguran, seperti penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Bukan Angkatan Kerja yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau menganggur, yaitu penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Informasi yang diperoleh dari Sakernas adalah jumlah penduduk bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga dan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan termasuk status pekerjaan. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam pekerjaannya yang dikategorikan menjadi pekerja/karyawan tetap dan pekerja bebas. Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama dikategorikan menjadi berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tetap/tidak tetap atau anggota rumah tangga, dan pekerja tak dibayar/pekerja keluarga.

Dari kategori menurut status pekerjaan dapat diperoleh informasi keadaan dinamika pasar kerja dan tingkat pembangunan suatu daerah. Kemajuan pembangunan mengharapkan terjadinya pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan sektor jasa, peningkatan jumlah pekerja digaji/dibayar (buruh/karyawan/pegawai) serta penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian.

Pekerja/karyawan tetap adalah seseorang yang bekerja pada perusahaan/instansi atau perorangan, baik pemerintah maupun swasta, secara tetap



dengan menerima upah/gaji berupa uang maupun barang. Sementara pekerja/karyawan yang memiliki majikan tidak tetap yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir, dianggap sebagai pekerja bebas. Khusus sektor konstruksi batasan waktunya lebih lama yaitu dalam tiga bulan terakhir. Pekerja bebas terdiri atas pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas non pertanian.

Dengan menggunakan penimbang angka proyeksi penduduk tahun 2010-2035, hasil Sakernas Agustus 2014 -2015 diketahui lebih dari 47 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas di D.I. Yogyakarta yang bekerja, berstatus pekerja/karyawan baik sebagai pekerja/karyawan tetap maupun pekerja bebas. Pada Agustus 2015 persentase pekerja/karyawan sebesar 54,9 persen dan Agustus 2014 sebesar 47,7 persen, peningkatan ini terjadi karena pekerja/karyawan laki-laki meningkat 5,2 poin, demikian pula pekerja/karyawan perempuan meningkat 1,9 poin. Pada Agustus 2015 dari 54,9 persen pekerja/karyawan sebesar 45,2 persen merupakan pekerja/karyawan tetap dan 9,7 persen pekerja/karyawan bebas (Tabel 1).

Tabel 1. Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di D.I. Yogyakarta Agustus 2014 - 2015

Status Pekerjaan (1)	Agustus 2014			Agustus 2015		
	L (2)	P (3)	L+P (4)	L (5)	P (6)	L+P (7)
1	11,8	16,6	13,9	13,3	18,4	15,5
2	25,8	13,8	20,5	19,9	14,2	17,5
3	57,3	42,8	47,7	62,5	44,7	54,9
4	5,1	29,1	14,8	4,3	22,7	12,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.1	46,4	39,3	39,0	48,8	40,3	45,2
3.2	10,9	3,5	7,6	13,7	4,4	9,7

Sumber: Sakernas Agustus 2014 - 2015.

Keterangan :

1 = Berusaha sendiri ;

2 = Berusaha dibantu orang lain ;

3 = Pekerja/karyawan

(3.1 = pekerja tetap dan 3.2 = pekerja bebas) ;

4 = Pekerja keluarga/tak dibayar ;

L = Laki-laki ; P = Perempuan

Pada Agustus 201 dari seluruh penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus sebagai pekerja/karyawan sebesar 57,3 persen dan pada Agustus 2015 mengalami peningkatan menjadi 62,5 persen. Demikian pula untuk perempuan pada periode yang sama pekerja/karyawan mengalami peningkatan dari 42,8 persen menjadi 44,7 persen. Pada Agustus 2015 dari 62,5 persen pekerja/karyawan laki-laki, yang berstatus sebagai pekerja tetap sebesar 48,8 persen dan 13,7 persen sebagai pekerja bebas, sedangkan untuk pekerja/karyawan perempuan sebagai pekerja/karyawan tetap sebesar 40,3 persen dan 4,4 persen sebagai pekerja bebas. Pada Agustus 2014 penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas mencapai 7,6 persen dan pada Agustus 2015 mengalami peningkatan menjadi 9,7 persen. Pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tak dibayar mengalami peningkatan sebesar 0,9 poin dari 3,5 persen menjadi 4,4 persen pada Agustus 2015.

Perbedaan yang cukup nyata antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam status pekerja keluarga/tidak dibayar adalah bahwa pekerja laki-laki kurang dari 5,5 persen, sedangkan pekerja perempuan di atas 22 persen atau 4 kali lipatnya. Pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar mengalami penurunan 6,4 poin atau sebesar 29,1 persen pada Agustus 2014 dan menjadi 22,7 persen pada Agustus 2015 (Tabel 2).

Tabel 2. Persentase pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tak dibayar menurut sektor/lapangan usaha di D.I. Yogyakarta Agustus 2014 - 2015

Sektor	2014	2015
(1)	(2)	(3)
<i>Agriculture/A/Pertanian</i>	72,0	66,4
<i>Manufacture/M/Industri, Pertambangan, Kontruksi</i>	8,4	10,4
<i>Service/S/Perdagangan, Transportasi, Keuangan & Jasa</i>	19,6	23,2
Persentase Total	100,0	100,0
Persentase Perempuan Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	29,1	22,7

Sumber: Sakernas Agustus 2014 - 2015.

Komposisi penyerapan pekerja perempuan dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar menurut sektor/lapangan usaha terjadi pergeseran, pada Agustus 2015 sektor pertanian (A) mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,6 poin atau dari 72,0 persen pada Agustus 2014 menjadi 66,4 persen. Selama kurun waktu yang sama pada dua sektor lainnya mengalami peningkatan yaitu sektor perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa (S) dari 19,6 persen menjadi 23,2 persen, dan sektor industri, pertambangan dan konstruksi (M) dari 8,4 persen menjadi 10,4 persen. Perempuan dengan status pekerja keluarga/tak dibayar selama dua tahun terakhir di D.I. Yogyakarta banyak terserap di sektor pertanian karena sektor pertanian sebagai sektor sekunder tidak mensyaratkan pendidikan, latihan, pengalaman/keahlian kerja, upah rendah, fleksibilitas waktu dan tidak meninggalkan tugas utama perempuan untuk mengurus rumah tangga.

V. PEKERJA/KARYAWAN MENURUT SEKTOR/LAPANGAN USAHA

Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Untuk kesederhanaan hasil dan pembahasan, sektor/lapangan usaha yang ada dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu Sektor A atau Sektor *Agriculture* (Pertanian), Sektor M atau Sektor *Manufacture* (Pertambangan/penggalian, Industri pengolahan, Listrik/Gas/Air, dan Konstruksi), dan Sektor S atau Sektor *Services* (Perdagangan, Transportasi, Keuangan dan Jasa-jasa).

Sektor S sampai dengan Agustus 2015 masih merupakan sektor yang terbanyak menyerap pekerja/karyawan meskipun mengalami penurunan (63,7 persen pada Agustus 2014 dan 62,0 persen pada Agustus 2015) diikuti sektor M (32,1 persen) dan sektor A 5,9 persen. Tabel 3 menunjukkan persentase pekerja/karyawan laki-laki yang terserap di sektor M (38,2 persen) dan A (6,1 persen) lebih besar dari pada persentase perempuan yang terserap di sektor yang sama (20,6 persen dan 5,4 persen). Sebaliknya di sektor S persentase pekerja perempuan yang terserap (74,0 persen) lebih tinggi dari pada persentase pekerja laki-laki.

Secara umum terjadi pergeseran jumlah penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor selama kurun waktu 1 tahun. Sektor A mengalami peningkatan, sektor M tetap sedangkan sektor S mengalami penurunan. Sektor A mengalami peningkatan sebesar 1,7 poin sebaliknya dengan sektor S yang penurunannya yang sama nilainya yaitu 1,7 poin. Hal ini sesuai dengan misi nomor 2 D.I. Yogyakarta yang tercantum dalam RPJM 2012-2017 yaitu menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif menuju visi “D.I. Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”.



Tabel 3. Persentase Pekerja/karyawan menurut sektor/lapangan usaha di D.I. Yogyakarta, Agustus 2014 - 2015

Lapangan usaha	Agustus 2014			Agustus 2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	4,7	3,6	4,2	6,1	5,4	5,9
M	39,3	20,0	32,1	38,2	20,6	32,1
S	56,0	76,4	63,7	55,7	74,0	62,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas Agustus 2014 - 2015.

Keterangan :

A = Sektor *Agriculture* (Pertanian).

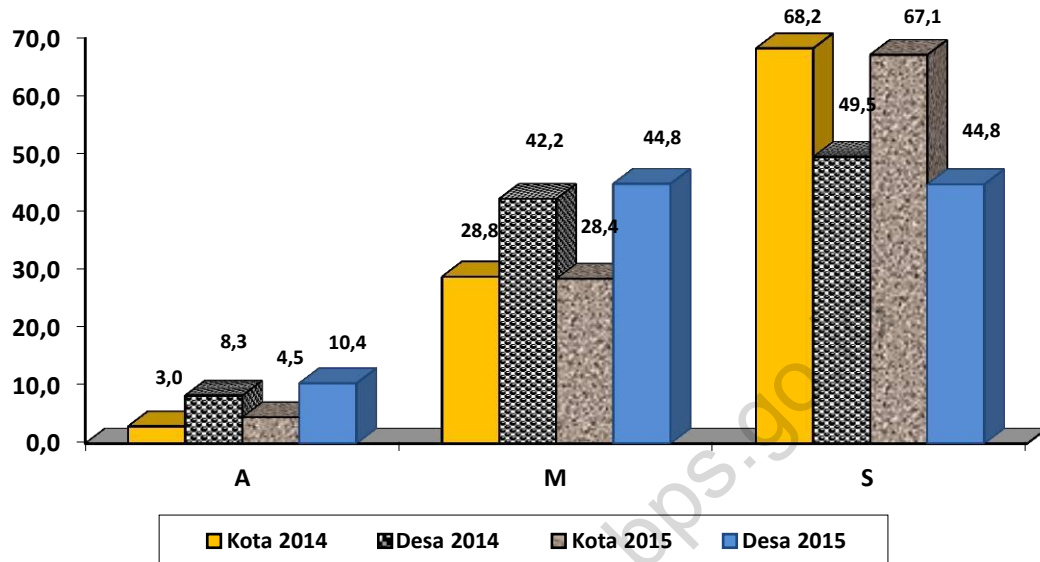
M = Sektor *Manufacture* (Pertambangan, Industri, Listrik dan Konstruksi).

S = Sektor *Services* (Perdagangan, Transportasi, Keuangan dan Jasa-jasa).

Tabel 3 juga memperlihatkan perkembangan persentase pekerja/karyawan di sektor A mengalami peningkatan dari 4,2 persen pada Agustus 2014 menjadi 5,9 persen pada Agustus 2015, demikian juga dengan persentase pekerja/karyawan perempuan yang bekerja di sektor ini mengalami peningkatan dari 3,6 persen menjadi 5,4 persen selama periode Agustus 2014-2015 dan persentase pekerja/karyawan laki-laki sektor A juga meningkat sebesar 1,4 poin. Sedangkan persentase pekerja/karyawan laki-laki sektor S mengalami penurunan dari 56,0 persen pada Agustus 2014 menjadi 55,7 persen pada Agustus 2015 dan persentase pekerja perempuan pada sektor dan periode yang sama juga mengalami penurunan dari 76,4 persen menjadi 74,0 persen.

Pada Agustus 2015, di daerah perkotaan proporsi pekerja/karyawan yang bekerja di sektor S masih sangat dominan yaitu sekitar 62,1 persen, sedangkan sumbangan pekerja/karyawan di sektor A yang terkecil, yaitu sekitar 5,8 persen. Berbeda dengan kondisi di daerah pedesaan, pekerja/karyawan di sektor S dan sektor M berkisar antara 25,0 persen sampai dengan 62,0 persen, sedangkan sektor A baik pedesaan maupun perkotaan berada di bawah 6 persen.

Gambar 1. Persentase Pekerja/Karyawan menurut Sektor dan Daerah Tempat Tinggal di D.I. Yogyakarta, Agustus 2014 - 2015



Sumber: Sakernas Agustus 2014 - 2015.

Terjadi peningkatan persentase pekerja/karyawan di sektor A dan sektor M di daerah pedesaan selama Agustus 2014-2015, sektor A meningkat 2,1 persen poin dan sektor M 2,6 persen poin. Sementara itu sektor S di pedesaan mengalami penurunan sebesar 4,7 persen poin dari 49,5 persen menjadi 44,8 persen, demikian juga di perkotaan turun sebesar 1,1 persen poin dari 68,2 persen menjadi 67,1 persen pada periode Agustus 2014 - 2015.

VI. PEKERJA/KARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pekerja/karyawan di D.I. Yogyakarta pada tahun 2014 mengalami perubahan. Tabel 4 memperlihatkan persentase pekerja berpendidikan SLTP atau lebih rendah mengalami penurunan dari 36,8 persen tahun 2014 menjadi 34,9 persen tahun 2015 dan persentase pekerja/karyawan berpendidikan SLTA ke atas juga mengalami penurunan dari 23,2 persen menjadi 22,7 persen, sedangkan persentase pekerja/karyawan berpendidikan SLTA mengalami peningkatan dari 40,0 persen menjadi 42,2 persen pada periode waktu yang sama. Penurunan persentase pekerja/karyawan dengan jenjang pendidikan SLTP ke bawah dan peningkatan persentase pekerja/karyawan SLTA menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas SDM D.I. Yogyakarta, baik untuk pekerja/karyawan laki-laki maupun perempuan dengan meningkatnya jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi dan untuk jenjang SLTA ke atas juga menurun dimungkinkan banyak lulusan SLTA atau Perguruan Tinggi yang memilih melanjutkan pendidikan lebih dahulu.

Tabel 4. Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2014 - 2015

Pendidikan ditamatkan	Agustus 2014			Agustus 2015		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
s/d SLTP	37,6	35,4	36,8	37,4	30,4	34,9
SLTA	43,2	34,6	40,0	44,9	37,6	42,4
> SLTA	19,2	30,0	23,2	17,7	32,0	22,7
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas Agustus 2014 - 2015.

Secara keseluruhan pekerja/karyawan dengan latar belakang pendidikan sampai dengan SLTP mengalami peningkatan dari 34,9 persen menjadi 36,8 persen selama kurun waktu satu tahun. Pekerja/karyawan laki-laki dengan latar belakang pendidikan SLTP atau lebih rendah meningkat dari 35,0 persen pada Agustus 2013 *Backcasting* menjadi 37,6 persen pada Agustus 2014. Demikian halnya terjadi pada pekerja/karyawan perempuan dari 34,7 persen menjadi 35,4 persen.

Tabel 4 juga memperlihatkan adanya peningkatan secara umum pada pekerja/karyawan dengan pendidikan di atas SLTA. Persentase pekerja laki-laki berpendidikan di atas SLTA mengalami peningkatan 1,3 poin persen (dari 17,9 persen pada Agustus 2013 *Backcasting* menjadi 19,2 persen pada Agustus 2014) dan pekerja perempuan meningkat 0,8 poin persen (dari 29,2 persen pada Agustus 2013 *Backcasting* menjadi 30,0 persen pada Agustus 2014).

Pada periode Agustus 2013 sampai Agustus 2014 persentase pekerja/karyawan berpendidikan SLTA secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan. Pekerja/karyawan laki-laki berpendidikan SLTA mengalami penurunan dari 47,1 persen menjadi 43,2 persen, demikian pula dengan persentase pekerja/karyawan perempuan pada tingkat pendidikan yang sama menurun dari 36,1 persen menjadi 34,6 persen.

Menurunnya persentase pekerja/karyawan berpendidikan SLTA diduga karena adanya kecenderungan lulusan SLTA dan sederajat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau bekerja di luar wilayah D.I. Yogyakarta. Sekarang ini banyak perusahaan, pelaku usaha, instansi pemerintah dan swasta memberlakukan syarat pelamar kerja dengan pendidikan minimal diploma/akademi. Hal ini juga berkaitan dengan upah/gaji yang diterima, semakin tinggi tingkat pendidikan, upah/gaji yang didapat semakin besar.

VII. RATA-RATA UPAH/GAJI PEKERJA/KARYAWAN

Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja/karyawan serta keluarganya, memerlukan berbagai kebijakan dalam penetapan tingkat upah/gaji pekerja/karyawan. Banyak faktor yang menentukan besarnya upah/gaji seorang pekerja/karyawan, antara lain lapangan usaha, pendidikan, jam kerja dan pengalaman kerja.

Tabel 5 menunjukkan secara keseluruhan rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan sebulan menurut sektor/lapangan usaha selama 2 tahun terakhir meningkat yaitu Rp. 1.616.090,- pada Agustus 2014 menjadi Rp. 1.688.324,- pada Agustus 2015. Rata-rata upah/gaji pekerja/karyawan perempuan pada Agustus 2015 sebesar Rp. 1.525.481,- sedangkan laki-laki mencapai Rp. 1.774.600,- sebulan.

Tabel 5. Rata-Rata Upah/Gaji Sebulan menurut Sektor/Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta, Agustus 2014 - 2015

Lapangan usaha (1)	Agustus 2014			Agustus 2015		
	L (2)	P (3)	L+P (4)	L (5)	P (6)	L+P (7)
A	1,418,668	700,565	1,192,558	864,365	619,789	785,877
M	1,348,089	960,682	1,257,474	1,525,990	1,221,922	1,458,560
S	2,057,657	1,541,999	1,825,055	2,044,548	1,676,094	1,892,300
Rata-rata	1,748,580	1,395,864	1,616,090	1,774,600	1,525,481	1,688,324

Sumber: Sakernas Agustus 2014 - 2015.

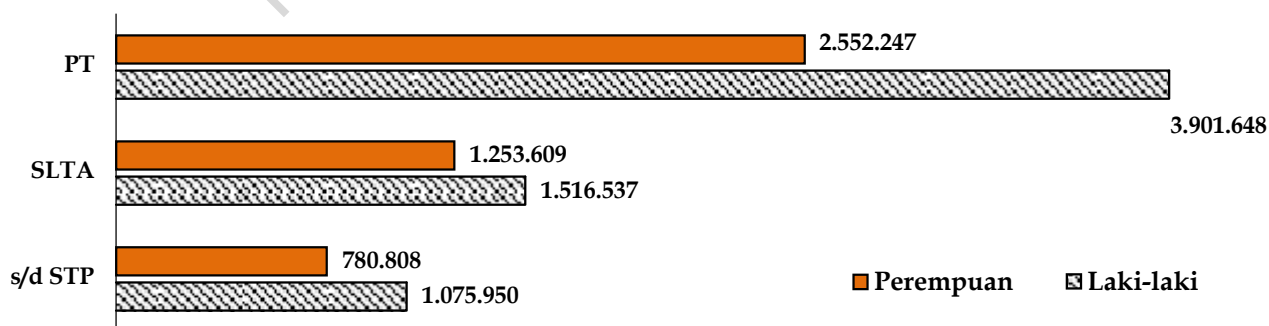
Rata-rata upah/gaji tertinggi diterima oleh pekerja/karyawan di sektor S pada Agustus 2015 sekitar Rp. 1.892.300,-. Upah/gaji pekerja/karyawan laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar Rp 2.044.548,- dan Rp 1.676.481,-. Pada umumnya upah/gaji pekerja/karyawan perempuan cenderung lebih rendah dari pada upah/gaji pekerja laki-laki. Rata-rata upah pekerja/karyawan di sektor A dan M berada di bawah rata-rata upah secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan.

Nampaknya ada perlakuan yang berbeda terhadap pekerja/karyawan laki-laki dan perempuan dalam penentuan tingkat upah/gaji yang diberikan, ini diduga karena perempuan yang mempunyai tugas pokok sebagai ibu rumah tangga jika terpaksa bekerja hanya sekedar membantu, sehingga mungkin tidak mencurahkan tenaga/waktunya sepenuhnya khususnya di pekerjaan yang sifatnya informal, dan ini merupakan salah satu gambaran kaum perempuan menghadapi beragam masalah dalam mengakses pendidikan dan pelatihan, dalam mendapatkan pekerjaan, dan dalam memperoleh perlakuan yang sama di tempat kerja.

Faktor lain yang dapat menentukan besarnya upah/gaji adalah tingkat pendidikan pekerja/karyawan. Para pekerja/karyawan yang hanya memiliki pendidikan SLTA ke bawah, rata-rata upah/gaji yang diterima masih sangat rendah, yaitu berada di bawah rata-rata upah/gaji dari pekerja secara keseluruhan.

Berbeda dengan mereka yang berpendidikan lebih tinggi yaitu Perguruan Tinggi, mereka mempunyai kondisi yang lebih baik. Rata-rata upah/gaji yang diterima berada di atas rata-rata keseluruhan yaitu sebesar Rp 3.901.648,- untuk pekerja/ karyawan laki-laki dan Rp 2.552.247,- untuk pekerja/karyawan perempuan. Rata-rata upah/gaji yang diterima mereka yang berpendidikan tinggi sekitar dua kali lipat rata-rata upah/gaji secara keseluruhan pada Agustus 2015.

Gambar 2. Rata-Rata Upah/Gaji Pekerja/Karyawan menurut Pendidikan yang Ditamatkan di D.I. Yogyakarta, Agustus 2015



Sumber: Sakernas Agustus 2015.

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja/karyawan semakin tinggi pula rata-rata upah/gaji yang diterima. Dengan demikian, salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup pekerja/karyawan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilakukan melalui pembangunan di bidang pendidikan. Lebih spesifik lagi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudian akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korelasi antara pendidikan dengan pendapatan lebih signifikandi negara yang sedang membangun.

VIII. UPAH MINIMUM KAB/KOTA DAN UPAH MINIMUM PROVINSI

Survei Upah mulai Triwulan III 2013 sudah tidak dilaksanakan lagi dan akan diintegrasikan dengan survei BPS yang lain, sehingga data yang disajikan menggunakan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi. Menurut Undang Undang No 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting dari upah minimum (Sumarsono, 2003) yaitu :

- a) Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali diterima bekerja.
- b) Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Sasaran dari kebijakan upah minimum adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Kebijakan upah minimum adalah untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas pekerja, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien.

Selama lebih dari 40 tahun sejak upah minimum pertama kali diberlakukan, Indonesia telah 3 kali mengganti standar kebutuhan hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi: kebutuhan fisik minimum (KFM) yang berlaku tahun 1969 - 1995; Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku Tahun 1996 - 2005 dan kemudian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku tahun 2006-hingga sekarang. Di samping itu, pengertian (definisi) upah minimum, dan istilah-istilahnya juga mengalami beberapa kali perubahan seiring perkembangan dan perubahan regulasi.

Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan melalui proses panjang. Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari unsur birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha. UMP D.I. Yogyakarta pertama kali ditetapkan tahun 2000 sebesar Rp 194.500,-/bulan, perkembangan UMP setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) mulai tahun 2013 ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota sedangkan untuk UMP D.I. Yogyakarta diambil dari nilai Upah Minimum Kabupaten/kota yang terendah di D.I. Yogyakarta yakni UMK Gunungkidul. Tabel 6 menunjukkan perkembangan UMP/K dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang cenderung terus meningkat.

Tabel 6. Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/kota dan Upah Minimum Provinsi di D.I. Yogyakarta Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota/ Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	892 660	954 000	1 069 000	1 138 000	1 268 870
Bantul		993 484	1 125 000	1 163 800	1 297 700
Gunungkidul		947 114	988 500	1 108 249	1 237 700
Sleman		1 026 181	1 127 000	1 200 000	1 338 000
Yogyakarta		1 065 247	1 173 300	1 305 500	1 452 400
D.I. Yogyakarta	892 660	947 114	988 500	1 108 249	1 237 700

Sumber: www.nakertrans.jogjaprov.go.id

UMP dan UMK D.I. Yogyakarta tahun 2012 masih menggunakan satu nilai sebesar Rp Rp 892.660,- sebulan, mulai tahun 2013 masing-masing kabupaten/kota mempunyai UMK sendiri. Urutan UMK dari terbesar sampai terkecil selama 4 (empat) tahun tidak mengalami perubahan yaitu Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo dan terakhir Gunung Kidul dan mulai tahun 2015 UMK D.I. Yogyakarta sudah diatas 1 juta rupiah.

IX. PASAR TENAGA KERJA

Penyebaran tenaga kerja yang tidak merata menyebabkan kurang optimalnya penggunaan sumber daya alam dan manusia. Untuk mengatasi ketidakmerataan tersebut dilakukan usaha-usaha antara lain melalui penyaluran dan pemanfaatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) serta penyaluran dan pemanfaatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Data pendaftaran pencari kerja, lowongan kerja (permintaan), dan penempatan kerja (pemenuhan) diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja. Metode pengumpulan data pasar tenaga kerja ini adalah berdasarkan pelaporan sehingga mungkin belum dapat menggambarkan sepenuhnya keadaan pasar tenaga kerja dan hanya digunakan sebagai gambaran kasar saja.

Tabel 7. Pasar Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, 2014-2015

Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencari kerja			
2014	38 854	41 735	80 589
2015	26 983	28 729	55 712
Lowongan kerja			
2014	5 039	6 596	11 635
2015	4 228	6 292	10 520
Penempatan/penghapusan			
2014	18 256	20 086	38 342
2015	6 843	6 862	13 705

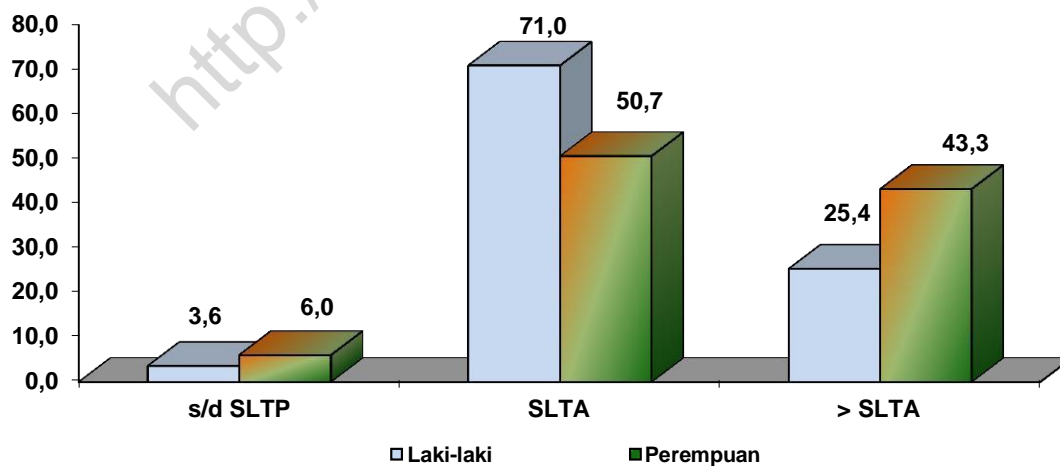
Sumber : Disnakertrans D.I. Yogyakarta

Tabel 7 memperlihatkan perbandingan antara pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans D.I. Yogyakarta terhadap lowongan kerja dan penempatan kerja pada tahun 2015 untuk laki-laki adalah 100:16:25. Ini berarti bahwa pada tahun 2015 dari setiap

100 orang pencari kerja laki-laki di D.I. Yogyakarta, terdapat lowongan kerja sebanyak 16 orang dan terdapat 25 orang yang berhasil ditempatkan bekerja, baik di D.I. Yogyakarta atau di daerah lain. Sementara untuk perempuan perbandingannya adalah 100:22:24. Dari perbandingan tersebut tampak bahwa peluang pencari kerja laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan untuk memperoleh pekerjaan. Dari seratus pencari kerja perempuan yang mendapatkan penempatan kerja (48 persen) lebih tinggi daripada penempatan kerja untuk laki-laki (47 persen) dan sebagian besar penempatan kerja berada di luar daerah. Tidak terpenuhinya seluruh lowongan kerja tersebut karena adanya berbagai hal, antara lain kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta, atau sebaliknya pencari kerja belum merasa cocok dengan lowongan yang tersedia meskipun sebenarnya persyaratannya memenuhi.

Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat digunakan untuk mengukur tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu daerah untuk bersaing dengan sukses di pasar tenaga kerja dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi. Persentase pencari pekerjaan yang terdaftar di Disnakertrans D.I. Yogyakarta menurut pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2015 tampak dominan pada pendidikan SLTA dan SLTA ke atas (Gambar 3.)

Gambar 3. Persentase Pencari Pekerjaan yang Terdaftar di Disnakertrans D.I. Yogyakarta menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015



Sumber : Disnakertrans D.I. Yogyakarta

Persentase pencari pekerjaan antara laki-laki dan perempuan dengan tingkat pendidikan kurang dari SLTP adalah 3,6 persen dan 6,0 persen, sedangkan pencari pekerjaan laki-laki (71,0 persen) dengan pendidikan SLTA dibanding pencari pekerjaan perempuan (50,7 persen). Ada berbagai kemungkinan pencari pekerjaan laki-laki pada tingkat pendidikan SLTA lebih banyak dari pada pencari pekerjaan perempuan antara lain tanggung jawab anak laki-laki dalam rumah tangga, ingin lebih cepat mandiri dan mencari penghidupan yang lebih baik dan pendidikan SLTA cukup sebagai bekal mencari kerja.

Sebaliknya pencari pekerjaan perempuan lebih tinggi persentasenya dibanding pencari pekerjaan laki-laki pada tingkat pendidikan SLTA ke atas yaitu sebesar 43,3 persen dan 25,4 persen. Kondisi ini kemungkinan berkaitan dengan jenjang pendidikan sebelumnya, perempuan ternyata lebih banyak yang melanjutkan pendidikan setelah SLTA. Dengan pendidikan lebih tinggi diharapkan mendapat pekerjaan yang lebih baik, sesuai dengan keinginan dan upah/gaji yang lebih tinggi.

Tabel 8. Tenaga Kerja Indonesia menurut Kabupaten/kota dan Negara Tujuan Terbanyak di D.I. Yogyakarta 2015

Kab/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Negara Tujuan Terbanyak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	158	356	514	Malaysia
Bantul	241	350	591	Malaysia
Gunungkidul	90	78	168	Malaysia
Sleman	171	256	427	Malaysia
Yogyakarta	81	59	140	Malaysia
D.I. Yogyakarta	741	1 099	1 840	Malaysia

Sumber : Disnakertrans D.I. Yogyakarta

Untuk mendapatkan kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan hidup dan menggapai cita-cita calon tenaga kerja terpaksa menerima kesempatan kerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Pada tahun 2015 berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I. Yogyakarta, jumlah tenaga kerja D.I. Yogyakarta yang bekerja di luar

negeri mencapai 741 orang untuk laki-laki dan 1 099 orang untuk perempuan. Jumlah tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja laki-laki terpaut 358 orang. Hal ini menunjukkan kesempatan kerja perempuan dan laki-laki di luar negeri lebih banyak perempuan. Pekerja perempuan di luar negeri menurut asal dan jumlah terbanyak adalah dari Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 356 orang, diikuti Kabupaten bantul sebanyak 350 orang, Kabupaten Sleman 256 orang, Kabupaten Gunungkidul 78 orang dan Kota Yogyakarta 59 orang. Pekerja laki-laki di luar negeri menurut asal dan jumlah, urutannya adalah Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Jika dilihat menurut negara tujuan, sebagian besar pekerja (60 persen) bekerja di Malaysia, sisanya tersebar di beberapa negara seperti Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Saudi Arabia, Amerika Serikat, Brunai Darussalam , Spanyol, Jepang, Qatar, Uni Emirat Arab, Hongkong, Australia, Selandia Baru, Italia, Zambia dan Afrika Selatan.

ISBN: 2460-3171



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://yogyakartaops.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**